



## Zakat dan Indeks Pembangunan Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Dimas Bayu Pangestu<sup>1\*</sup>, Fernaldi Anggadha Ratno<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga

\*) Penulis Korespondensi : [dimasbayupp@gmail.com](mailto:dimasbayupp@gmail.com)

**Abstract.** *The aim of this research is to analyze the influence of zakat (X1), Human Development Index (X2), wages (X3), and population (X4) on poverty (Y) in Central Java province in 2019-2021. The research carried out this time used quantitative research because the approach was carried out through a process of hypothesis testing, data analysis and creating a conclusion. The data used is secondary data based on time and region which is called panel data. Data was obtained via the BPS and BAZNAS Central Java access pages and processed using E-Views 9, with tests carried out using hypothesis testing and classical assumption testing. Based on the hypothesis test obtained, each variable partially influences poverty, with the result that variable X1 has an insignificant negative effect. Variable X2 has a significant negative effect on poverty. Variable X3 has a significant positive effect. Variable X4 has a positive and significant effect.*

**Keyword:** *ipm, poverty, total population, wages, zakat.*

**Abstrak.** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh zakat (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), upah (X3), dan jumlah penduduk (X4) terhadap kemiskinan (Y) di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2021. Penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan penelitian kuantitatif karena pendekatan yang dilakukan melalui proses uji hipotesis, analisis data dan menciptakan suatu kesimpulan. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan berdasarkan rentan waktu dan wilayah yang disebut dengan data panel. Data diperoleh melalui dari laman akses BPS dan BAZNAS Jawa Tengah dan diolah menggunakan E-Views 9, dengan uji yang dilakukan menggunakan uji hipotesis dan uji asumsi klasik. Berdasarkan uji hipotesis yang didapat, masing-masing variable secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan, dengan hasil variable X1 berpengaruh negatif tidak signifikan. Variabel X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Variabel X3 berpengaruh positif signifikan. Variabel X4 berpengaruh positif dan signifikan.*

**Kata Kunci:** *ipm, jumlah penduduk, kemiskinan, upah, zakat.*

diunggah: Oktober 2023; direvisi: Oktober 2023; disetujui: Januari 2024

*This is an open access article under the CC-BY licence*



© the Author(s). 2024

Cara Sitasi: Pangestu, Dimas Bayu & Ratno, Fernaldi Anggadha (2024). Zakat Dan Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pengentasan Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2019-2021. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 8(1), 30-44. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i1.434>

### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan (Irawati & Ratno, 2020). Masalah kemiskinan disebabkan karena kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau akses yang sulit ke pendidikan dan pekerjaan seseorang (Akbar, 2019). Selain kebutuhan primer, Kesehatan, dan pendapatan yang merupakan sebagai indikator seseorang bisa dibidang miskin, sekarang kemiskinan juga

memiliki standar kemiskinan yang lebih luas. Sebab standar kemiskinan bisa saja berubah atas dasar perkembangan dari peradaban manusia saat ini. Saat ini, kemiskinan bukan hanya sebatas ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya, namun pada zaman ini garis kemiskinan mempunyai kriteria yang semakin banyak (Damanik et al., n.d. 2020).

Secara umum kemiskinan menggambarkan sebuah keadaan sosial ekonomi di masyarakat. Kemiskinan menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah keadaan dari seseorang atau rumah tangga sulit memenuhi kebutuhan dasarnya sementara lingkungan yang tidak cukup mendukung untuk terus meningkatkan kesejahteraan sehingga sukar dari keluarnya kerentanan. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang, atau mungkin seorang individu, tidak mampu sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan pokoknya untuk mempertahankan dan memajukan gaya hidup martabatnya. Ketidakmampuan yang dimaksud ialah perihal mencukupi kebutuhan yang mendasar halnya sandang, pangan maupun papan serta ditambah dengan kemampuan dalam memenuhi kesehatan dan pendidikan (Syuhada, 2019).

Menurut (Pratama, 2019) ada beberapa factor dalam menyebabkan kemiskinan itu terjadi yaitu: Penyebab pribadi yang menganggap kondisi miskin dampak atas perilaku, pilihan atau daya dari orang yang miskin. Kedua, alasan keluarga hubungan antara pendidikan di keluarga dan kondisi miskin. Ketiga, alasan subkulrut yang mengkaitkan kehidupan sehari-hari dan kemiskinan diteliti atau dilakukan bersama-sama dengan pihak lingkungan. Keempat, alasan agensi, memperlakukan kondisi miskin atas dampak dari tindakan orang lain, termasuk pemerintah, orang dan ekonomi. Terakhir alasan struktural yang menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi sebuah bagian turun temurun sosial.

Kemiskinan memiliki peranan yang vital dalam menjadikan kiblat berhasil atau tidaknya pembangunan sutau negara. Dari hal tersebut, kemiskinan menjadikan suatu masalah yang berhubungan dengan pembangunan (Irawati & Ratno, 2020). Semakin kecil angka kemiskinan dalam suatu wilayah, maka pembangunan wilayah tersebut akan baik. Sebaliknya, apabila angka kemiskinan cukup tinggi, maka pembangunan negara atau daerah akan sulit untuk berkembang. Terjadinya sebuah kemiskinan salah satunya disebabkan karena kurangnya pendapatan yang dimiliki. Berbicara kemiskinan berkaitan juga dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi seluruh masyarakat yang umumnya orang yang dikatakan miskin individu yang tidak mempunyai pekerjaan hingga aspek pendidikan dan kesehatan belum mampu bisa dirasakan seperti umumnya karena kesulitan dalam mengakses hal tersebut.

Angka kemiskinan Indonesia terus mengalami kenaikan persentase khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa provinsi Jawa Tengah menduduki urutan kedua di pulau Jawa dalam persentase kemiskinan tertinggi yang mencapai 10,98% di bulan September 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mulai dari 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 1.  
 Persentase Kemiskinan Jawa Tengah 2019-2021

Kabupaten / Kota	Persentase Kemiskinan Jawa Tengah		
	2019	2020	2021
Provinsi Jawa Tengah	10.80	11.41	11.79
Kabupaten Cilacap	10.73	11.46	11.67
Kabupaten Banyumas	12.53	13.26	13.66
Kabupaten Purbalingga	15.03	15.90	16.24
Kabupaten Banjarnegara	14.76	15.64	16.23
Kabupaten Kebumen	16.82	17.59	17.83
Kabupaten Purworejo	11.45	11.78	12.40
Kabupaten Wonosobo	16.63	17.36	17.67
Kabupaten Magelang	10.67	11.27	11.91
Kabupaten Boyolali	9.53	10.18	10.62
Kabupaten Klaten	12.28	12.89	13.49
Kabupaten Sukoharjo	7.14	7.68	8.23
Kabupaten Wonogiri	10.25	10.86	11.55
Kabupaten Karanganyar	9.55	10.28	10.68
Kabupaten Sragen	12.79	13.38	13.83
Kabupaten Grobogan	11.77	12.46	12.74
Kabupaten Blora	11.32	11.96	12.39
Kabupaten Rembang	14.95	15.60	15.80
Kabupaten Pati	9.46	10.08	10.21
Kabupaten Kudus	6.68	7.31	7.60
Kabupaten Jepara	6.66	7.17	7.44
Kabupaten Demak	11.86	12.54	12.92
Kabupaten Semarang	7.04	7.51	7.82
Kabupaten Temanggung	9.42	9.96	10.17
Kabupaten Kendal	9.41	9.99	10.24
Kabupaten Batang	8.35	9.13	9.68
Kabupaten Pekalongan	9.71	10.19	10.57
Kabupaten Pemasang	15.41	16.02	16.56
Kabupaten Tegal	7.64	8.14	8.60
Kabupaten Brebes	16.22	17.03	17.43
Kota Magelang	7.46	7.58	7.75
Kota Surakarta	8.70	9.03	9.40
Kota Salatiga	4.76	4.94	5.14
Kota Semarang	3.98	4.34	4.56
Kota Pekalongan	6.60	7.17	7.59
Kota Tegal	7.47	7.80	8.12

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tiap tahun persentase permasalahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tidak pernah mengalami penurunan. Dengan adanya masalah ini, pemerintah bisa terus berupaya dalam mengurangi bahkan mengentaskan tingkat kemiskinan dengan selalu bekerja keras secara optimal dan membuat kebijakan-kebijakan tentang cara menanggulangi kemiskinan yang menjadi sebuah permasalahan di Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, salah satunya dalam perspektif islam yaitu zakat. Melalui perantara zakat diharapkan mampu dapat mengurangi angka kemiskinan (Chaniago, 2015). Kaum Muslim yang paham tentang zakat dan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan bantuan bisa menjadikan salah satu upaya dalam mengurangi masalah kemiskinan yang ada. Persentase tingkat kemiskinan dapat ditekan dengan instrument zakat. Secara istilah, zakat merupakan Sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Pada instrument zakat sendiri mempunyai tujuan selain dari membersihkan sebagian harta ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya zakat bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang fakir sehingga menciptakan pembangunan yang merata (Hasanudin, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan data yang dapat mengukur keberhasilan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah (Gabriel et al., 2021) . Tinggi rendahnya produktivitas kerja dari penduduk tergantung dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Kualitas pembangunan manusia dapat diukur dari data yang dapat dijelaskan dari tiga komponen IPM mencakup tiga unsur yaitu, pendidikan, kesehatan serta daya beli pada masyarakat yang mana sangat menentukan kualitas hidup manusia (Fajar, M. A., & Indrawati, 2020). Komponen tersebut terpenuhi dan dapat dirasakan oleh masyarakat akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Menurut data yang diperoleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada tahun 2019 IPM di provinsi Jawa tengah mencapai 69,98%, di tahun 2020 mencapai 71,87%, dan di tahun 2021 mencapai 72,16%. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase IPM Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan yang dapat diartikan kualitas dari masyarakat itu selalu meningkat.

Upah menjadikan faktor lain dalam hal yang mempengaruhi masalah kemiskinan, dengan upah yang diterima itu rendah pada masyarakat bisa mempengaruhi terhadap pendapatan yang rendah pula di masyarakat. Upah rendah sudah pasti memiliki efek langsung maupun tidak langsung pada tingkat kemiskinan. Apabila upah yang didapat rendah maka seseorang tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari (Kusumo, 2020). Dari hasil data yang diperoleh pada BPS Jawa Tengah rata rata upah pada tahun 2019 ialah 2,19 juta, di tahun 2020 mencapai 2,09 juta, dan di tahun 2021 2,07 juta setiap bulannya.

Laju pertumbuhan penduduk menjadi faktor lain dalam menyebabkan tingkat kemiskinan. Setiap tahun jumlah penduduk di suatu wilayah akan berfluktuasi meningkat tergantung dari banyaknya peristiwa kelahiran. Jika tidak bisa dikendalikan, populasi menjadi masalah karena populasi terus bertambah yang akan menjadi masalah dalam hal kemiskinan. Pertumbuhan penduduk dapat mengurangi kemiskinan selama orang mendapatkan pekerjaan yang memenuhi semua kebutuhannya (Wahyu Azizah & Kusuma, 2018). Dari hasil data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2022 pertumbuhan

penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2019 mencapai 34.718.204 jiwa, di tahun 2020 mencapai angka 36.516.035 jiwa, dan di tahun berikutnya mencapai 36.742.501 jiwa. Dengan adanya hal ini pemerintah bisa memberikan gagasan atau kebijakan yang tepat sehingga dapat mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk untuk bisa meningkatkan kesejahteraan.

Maka penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan penganalisaan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari zakat, indeks pembangunan manusia, upah dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2021.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, serta variabel yang digunakan ialah terdiri dari zakat, indeks pembangunan manusia, upah dan jumlah penduduk di Jawa Tengah. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu analisis regresi panel yang merupakan gabungan dari (*time series*) yaitu dari tahun 2019-2021 dan (*cross section*) yaitu pada daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 kota.

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui berbagai sumber jurnal, buku, dan sumber lainnya. Penulis melakukan pengumpulan dengan dua tahap saat membuat penelitian ini. Langkah pertama adalah mengumpulkan jurnal dan artikel yang relevan dan sudah diterbitkan. Langkah kedua memerlukan data-data yang sudah terkumpul guna diperlukan untuk analisis penelitian berlangsung. Teknik analisis yang dipakai menggunakan data sekunder. Data rangkuman yang dihasilkan menggunakan hasil data dari BPS dan Lembaga Baznas.

Penelitian ini menggunakan menggunakan data panel dengan variabel independent yang digunakan ialah zakat, ipm, upah dan jumlah penduduk. Untuk variabel dependen yang digunakan adalah kemiskinan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah permasalahan yang sedang dialami pada Provinsi Jawa Tengah, dengan penelitian ini bisa mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independent kepada variabel dependen. Secara umum persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Ket: N = banyaknya unit observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

$\alpha_i$  = intersept

$\beta$  = slope

$\varepsilon_{it}$  = error individu ke i waktu ke t

Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis uji statistik dengan menjabarkan Uji Determinasi  $R^2$ , Uji F (simultan) dan Uji T (parsial). Setelah dilakukannya Uji Statistik, selanjutnya melakukan Uji Asumsi Klasik yang berisikan Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedasitas dengan menggunakan peralatan statistic *software E-Views 9*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.  
 Data Variabel

Daerah	Tahun	Kemiskinan	Zakat	IPM	Upah	Penduduk
Kabupaten Cilacap	2019	10.73	8,458,485,853	69.98	1,989,058	1,727,098
Kabupaten Cilacap	2020	11.46	12,723,570,149	69.95	2,158,327	1,944,857
Kabupaten Cilacap	2021	11.67	14,848,902,937	70.42	2,228,904	1,963,824
Kabupaten Banyumas	2019	12.53	10,076,046,322	71.96	1,750,000	1,693,006
Kabupaten Banyumas	2020	13.26	10,652,064,294	71.98	1,900,000	1,776,918
Kabupaten Banyumas	2021	13.66	12,626,099,699	72.44	1,970,000	1,789,630
Kabupaten Purbalingga	2019	15.03	2,806,194,842	68.99	1,788,500	933,989
Kabupaten Purbalingga	2020	15.90	2,532,162,287	68.97	1,940,800	998,561
Kabupaten Purbalingga	2021	16.24	2,780,348,372	69.15	1,988,000	1,007,794
Kabupaten Banjarnegara	2019	14.76	10,232,615,302	67.34	1,610,000	923,192
Kabupaten Banjarnegara	2020	15.64	9,795,975,680	67.45	1,748,000	1,017,767
Kabupaten Banjarnegara	2021	16.23	11,374,679,364	67.86	1,805,000	1,026,866
Kabupaten Kebumen	2019	16.82	6,718,030,379	69.60	1,700,000	1,197,982
Kabupaten Kebumen	2020	17.59	6,877,898,417	69.81	1,845,000	1,350,438
Kabupaten Kebumen	2021	17.83	6,111,262,059	70.05	1,905,400	1,361,913
Kabupaten Purworejo	2019	11.45	3,277,990,802	72.50	1,686,000	718,316
Kabupaten Purworejo	2020	11.78	3,137,636,144	72.68	1,835,000	769,880
Kabupaten Purworejo	2021	12.40	3,776,364,909	72.98	1,895,000	773,588
Kabupaten Wonosobo	2019	16.63	1,961,545,529	68.27	1,712,500	790,504
Kabupaten Wonosobo	2020	17.36	2,036,811,605	68.22	1,859,000	879,124

Daerah	Tahun	Kemiskinan	Zakat	IPM	Upah	Penduduk
Kabupaten Wonosobo	2021	17.67	2,488,596,647	68.43	1,920,000	886,613
Kabupaten Magelang	2019	10.67	2,452,171,836	69.87	1,882,000	1,290,591
Kabupaten Magelang	2020	11.27	2,494,432,402	69.87	2,042,200	1,299,859
Kabupaten Magelang	2021	11.91	3,907,740,617	70.12	2,075,000	1,305,512
Kabupaten Boyolali	2019	9.53	5,671,134,866	73.80	1,790,000	984,807
Kabupaten Boyolali	2020	10.18	6,139,985,598	74.25	1,942,500	1,062,713
Kabupaten Boyolali	2021	10.62	6,573,648,955	74.40	2,000,000	1,070,247
Kabupaten Klaten	2019	12.28	3,332,260,547	75.29	1,795,061	1,174,986
Kabupaten Klaten	2020	12.89	4,523,780,132	75.56	1,947,821	1,260,506
Kabupaten Klaten	2021	13.49	4,841,444,394	76.12	2,011,515	1,267,272
Kabupaten Sukoharjo	2019	7.14	1,251,240,371	76.84	1,783,500	891,912
Kabupaten Sukoharjo	2020	7.68	3,791,357,327	76.98	1,938,000	907,587
Kabupaten Sukoharjo	2021	8.23	5,403,878,550	77.13	1,986,450	911,603
Kabupaten Wonogiri	2019	10.25	310,479,391	69.98	1,655,000	959,492
Kabupaten Wonogiri	2020	10.86	1,373,034,583	70.25	1,797,000	1,043,177
Kabupaten Wonogiri	2021	11.55	218,980,157	70.49	1,827,000	1,049,292
Kabupaten Karanganyar	2019	9.55	17,424,057,989	75.89	1,833,000	886,519
Kabupaten Karanganyar	2020	10.28	22,827,840,943	75.86	1,989,000	931,963
Kabupaten Karanganyar	2021	10.68	20,356,638,156	75.99	2,054,040	938,808
Kabupaten Sragen	2019	12.79	3,578,027,760	73.43	1,673,500	890,518
Kabupaten Sragen	2020	13.38	3,869,691,519	73.95	1,815,915	976,951
Kabupaten Sragen	2021	13.83	9,320,950,385	74.08	1,829,500	983,641

Daerah	Tahun	Kemiskinan	Zakat	IPM	Upah	Penduduk
Kabupaten Grobogan	2019	11.77	3,129,571,580	69.86	1,685,500	1,377,788
Kabupaten Grobogan	2020	12.46	3,469,214,536	69.87	1,830,000	1,453,526
Kabupaten Grobogan	2021	12.74	5,993,526,078	70.41	1,890,000	1,460,873
Kabupaten Blora	2019	11.32	2,784,290,509	68.65	1,690,000	865,013
Kabupaten Blora	2020	11.96	3,222,098,911	68.84	1,834,000	884,333
Kabupaten Blora	2021	12.39	2,784,290,509	69.37	1,894,000	886,147
Kabupaten Rembang	2019	14.95	3,530,931,348	70.15	1,660,000	638,188
Kabupaten Rembang	2020	15.60	3,567,684,017	70.02	1,802,000	645,333
Kabupaten Rembang	2021	15.80	3,313,383,496	70.43	1,861,000	647,766
Kabupaten Pati	2019	9.46	2,670,148,010	71.35	1,742,000	1,259,590
Kabupaten Pati	2020	10.08	5,450,322,531	71.77	1,891,000	1,324,188
Kabupaten Pati	2021	10.21	6,522,631,921	72.28	1,953,000	1,330,983
Kabupaten Kudus	2019	6.68	2,805,045,730	74.94	2,044,468	871,311
Kabupaten Kudus	2020	7.31	2,818,245,546	75.00	2,218,452	849,184
Kabupaten Kudus	2021	7.60	1,925,416,304	75.16	2,290,995	852,443
Kabupaten Jepara	2019	6.66	2,872,865,009	71.88	1,879,031	1,257,912
Kabupaten Jepara	2020	7.17	3,118,050,018	71.99	2,040,000	1,184,947
Kabupaten Jepara	2021	7.44	3,335,858,163	72.36	2,107,000	1,188,510
Kabupaten Demak	2019	11.86	4,579,742,781	71.87	2,240,000	1,162,805
Kabupaten Demak	2020	12.54	4,529,675,539	72.22	2,432,000	1,203,956
Kabupaten Demak	2021	12.92	6,567,856,290	72.57	2,511,526	1,212,377
Kabupaten Semarang	2019	7.04	3,461,076,286	74.14	2,055,000	1,053,786

Daerah	Tahun	Kemiskinan	Zakat	IPM	Upah	Penduduk
Kabupaten Semarang	2020	7.51	4,134,475,291	74.10	2,229,881	1,053,094
Kabupaten Semarang	2021	7.82	4,404,195,125	74.24	2,302,798	1,059,844
Kabupaten Temanggung	2019	9.42	7,107,836,778	69.56	1,682,027	772,018
Kabupaten Temanggung	2020	9.96	6,947,094,845	69.57	1,825,200	790,174
Kabupaten Temanggung	2021	10.17	7,655,087,509	69.88	1,885,000	794,403
Kabupaten Kendal	2019	9.41	2,343,834,294	71.97	2,084,393	971,086
Kabupaten Kendal	2020	9.99	9,553,296,202	72.29	2,261,775	1,018,505
Kabupaten Kendal	2021	10.24	9,444,305,362	72.50	2,335,735	1,025,020
Kabupaten Batang	2019	8.35	2,591,375,025	68.42	1,900,000	768,583
Kabupaten Batang	2020	9.13	3,536,991,428	68.65	2,061,700	801,718
Kabupaten Batang	2021	9.68	3,536,991,428	68.92	2,129,117	807,005
Kabupaten Pekalongan	2019	9.71	3,785,057,435	69.71	1,859,885	897,711
Kabupaten Pekalongan	2020	10.19	4,218,353,150	69.63	2,018,161	968,821
Kabupaten Pekalongan	2021	10.57	4,435,278,316	70.11	2,084,155	976,504
Kabupaten Pemalang	2019	15.41	8,551,623,237	66.32	1,718,000	1,302,813
Kabupaten Pemalang	2020	16.02	8,340,134,431	66.32	1,865,000	1,471,489
Kabupaten Pemalang	2021	16.56	7,593,903,953	66.56	1,926,000	1,484,209
Kabupaten Tegal	2019	7.64	2,107,767,446	68.24	1,747,000	1,440,698
Kabupaten Tegal	2020	8.14	1,955,550,345	68.39	1,896,000	1,596,996
Kabupaten Tegal	2021	8.60	4,121,858,024	68.79	1,958,000	1,608,611
Kabupaten Brebes	2019	16.22	3,079,751,963	66.12	1,665,850	1,809,096
Kabupaten Brebes	2020	17.03	3,033,860,457	66.11	1,807,614	1,978,759

Daerah	Tahun	Kemiskinan	Zakat	IPM	Upah	Penduduk
Kabupaten Brebes	2021	17.43	4,093,391,299	66.82	1,866,723	1,992,685
Kota Magelang	2019	7.46	1,651,008,173	78.80	1,707,000	122,111
Kota Magelang	2020	7.58	1,552,093,649	78.99	1,853,000	121,526
Kota Magelang	2021	7.75	3,336,850,648	79.43	1,914,000	121,610
Kota Surakarta	2019	8.70	1,360,248,334	81.86	1,802,700	519,587
Kota Surakarta	2020	9.03	1,773,207,221	82.21	1,956,200	522,364
Kota Surakarta	2021	9.40	2,031,164,437	82.62	2,013,810	522,728
Kota Salatiga	2019	4.76	1,614,930,585	83.12	1,875,325	194,084
Kota Salatiga	2020	4.94	2,511,855,422	83.14	2,034,915	192,322
Kota Salatiga	2021	5.14	2,952,365,037	83.60	2,101,457	193,525
Kota Semarang	2019	3.98	8,074,610,207	83.19	2,498,588	1,814,110
Kota Semarang	2020	4.34	8,610,486,758	83.05	2,715,000	1,653,524
Kota Semarang	2021	4.56	12,537,820,209	83.55	2,810,025	1,656,564
Kota Pekalongan	2019	6.60	1,672,496,841	74.77	1,906,922	307,097
Kota Pekalongan	2020	7.17	2,082,258,341	74.98	2,072,000	307,150
Kota Pekalongan	2021	7.59	2,139,194,565	75.40	2,139,754	308,310
Kota Tegal	2019	7.47	1,068,388,142	74.93	1,762,000	249,905
Kota Tegal	2020	7.80	1,433,331,315	75.07	1,925,000	273,825
Kota Tegal	2021	8.12	1,966,915,150	75.52	1,982,750	275,781

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2022  
 & BAZNAS Jawa Tengah

Tujuan pertama dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan panel data yang menggunakan variabel zakat, indeks pembangunan manusia, upah dan jumlah penduduk sebagai variabel independent dan variabel kemiskinan sebagai variabel dependen. Untuk mengetahui hasil dari sebuah regresi data panel yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari zakat dan indeks pembangunan manusia dalam penentasan kemiskinan, penelitian ini menggunakan analisis uji hipotesis yang berupa uji T, uji F dan uji determinasi yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.

Tabel 3.  
 Uji Hipotesis

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Constanta</i>	13.35609	5.078068	2.630153	0.0099
Zakat	-3.78E-12	1.48E-11	-0.255684	0.7987
IPM	-0.166596	0.072694	-2.291743	0.0240
Upah Minimum	3.94E-06	2.55E-07	15.44610	0.0000
Penduduk	1.97E-06	3.93E-07	5.010813	0.0000
<i>Effects Specification</i>				
			S.D.	Rho
<i>Cross-section random</i>			2.409897	0.9958
<i>Idiosyncratic random</i>			0.155936	0.0042
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.811834	<i>Mean dependent var</i>		0.408611
<i>Adjusted R-squared</i>	0.804308	<i>S.D. dependent var</i>		0.433791
<i>S.E. of regression</i>	0.191897	<i>Sum squared resid</i>		3.682436
<i>F-statistic</i>	107.8615	<i>Durbin-Watson stat</i>		1.441298
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000			

#### Uji T

Menurut Ghozali (2013) Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh dari satu variabel independent secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel independen satu sama lain berkorelasi signifikan atau tidak, Uji T menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Ini dilakukan untuk mencari tahu terhadap variable dependen yang dipengaruhi oleh variable independent apakah variable lain nilainya konstan (Ratno, 2021).

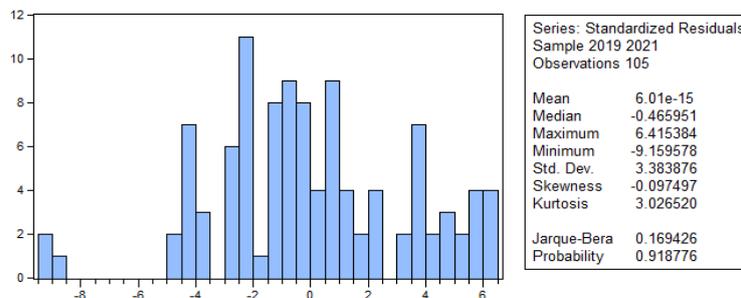
Variabel zakat menunjukkan mempunyai nilai sebesar  $0,7987 > 0,05$  pada probabilitasnya dan berkoefisien negatif. Sehingga dapat diartikan variabel zakat mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan secara parsial. Kemudian pada variabel IPM menunjukkan nilai sebesar  $0,0240 < 0,05$  pada probabilitasnya dan berkoefisien negatif. Dapat diartikan bahwa IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan secara parsialnya. variabel upah menunjukkan nilai sebesar  $0,0000 < 0,05$  pada probabilitasnya dan berkoefisien positif dan signifikan. Sehingga bisa diartikan bahwa upah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan secara parsialnya. variabel jumlah penduduk menunjukkan nilai sebesar  $0,0000 < 0,05$  pada probabilitasnya dan berkoefisien positif dan signifikan. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif signifikan secara parsialnya.

#### Uji F

Pengujian ini dilakukan agar dapat mencari tahu bahwasannya pengaruh variabel dependen dapat secara bersama-sama (simultan) terhadap variable dependen. Signifikansi secara bersama-sama diuji dengan dilihat signifikan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 (Ratno, 2021). Pada uji ini nilai *F-statistic* di probabilitasnya mempunyai nilainya sebesar  $0,000000 < 0,05$  yang artinya variabel zakat, IPM, upah, dan jumlah penduduk dapat memberi pengaruh kepada kemiskinan secara bersama sama (simultan).

Uji Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Uji determinasi pada dasarnya menghitung seberapa besar kemampuan model untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Pengujian ini dalam penggunaannya dapat mengetahui seberapa besar variasi daripada variabel independent (Ratno, 2021). Dilihat pada bagian *Adjusted R-Squared* di tabel di atas mempunyai nilai sebesar 0,804308 yang menjelaskan bahwa variabel zakat, IPM, upah dan jumlah penduduk dapat memberi pengaruh terhadap kemiskinan sebesar 80% sedangkan 20% dipengaruhi oleh variabel independen lain.



Gambar 1.  
 Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian tersebut terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,918776 > 0,05 yang diindikasikan bahwa data ini berdistribusi normal.

Tabel 3.  
 Uji Multikolinieritas

Variabel	Zakat	IPM	Upah Minimum	Jumlah Penduduk
Zakat	1.000000	0.002280	0.210538	0.385530
IPM	0.002280	1.000000	0.413488	-0.412188
Upah Minimum	0.210538	0.413488	1.000000	0.183339
Jumlah Penduduk	0.385530	-0.412188	0.183339	1.000000

Berdasarkan output uji multikolinieritas dengan menggunakan uji koefisien korelasi dapat dilihat bahwasannya tidak adanya hubungan silang yang lebih dari 0,90. Jadi bisa dijelaskannya dan dapat dipastikannya model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas.

Tabel 4.  
 Uji Autokorelasi

<i>R-squared</i>	0.403122	<i>Mean dependent var</i>	-0.025096
<i>Adjusted R-squared</i>	0.379006	<i>S.D. dependent var</i>	2.433291
<i>S.E. of regression</i>	1.917511	<i>Akaike info criterion</i>	4.186815
<i>Sum squared resid</i>	364.0079	<i>Schwarz criterion</i>	4.313950
<i>Log likelihood</i>	-212.7144	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	4.238321
<i>F-statistic</i>	16.71577	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.946505
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Nilai *Durbin-Watson Stat* yang diperoleh sebesar 1.946505 dalam pengujian data riset ini menunjukkan bahwa data terbebas dari masalah autokorelasi. Hal ini karena nilai DW terletak di antara dU dan 4-dU, yang mana pada nilai dU menunjukkan angka 1.7610 dan nilai 4-dU adalah 2.2390, maka  $dU < Dw < 4-dU$ .

Tabel 5.  
Uji Heteroskedasitas (*White Test*)

F-statistic	1.539304	Prob. F (14,90)	0.1133
Obs*R-squared	20.28482	Prob. Chi-Square(14)	0.1214
Scaled explained SS	14.77390	Prob. Chi-Square(14)	0.3938

Pada uji heteroskedasitas memperlihatkan bahwa setelah melakukan uji dengan menggunakan uji *tes white* didapatkan nilai probabilitas chi square pada bagian *Obs R-squared* bernilai  $0.1214 > 0,05$  sehingga dapat dipastikan tidak adanya suatu masalah heteroskedasitas pada data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Zakat

Bersumber pada tabel 3. di atas, nilai *coefficient* variabel zakat ialah  $-3.78E-12$  dengan nilai probabilitasnya adalah  $0.7897$  yang menunjukkan  $> 0,05$  yang memiliki arti negatif tidak signifikan. Penelitian yang didapat pada hasil ini sejalan atau sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tawakkal & Sapha, 2018). Zakat belum mampu mengatasi kemiskinan bisa disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, belum mampunya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan bisa disebabkan juga karena zakat hanya dapat mengatasi kemiskinan dari sisi ekonomi saja. Pemerintah harus lebih serius lagi dalam hal upaya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana pentingnya membayar zakat.

### Indeks Pembangunan Manusia

Bersumber pada tabel 3. di atas, nilai *coefficient* variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah  $-0.166596$  dengan nilai probabilitasnya ialah  $0.0240$  yang menunjukkan  $< 0.05$ , yang memiliki arti pengaruh negatif dan signifikan. Pada riset ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018).

Salah satu indikator yang banyak digunakan untuk melihat suatu tingkat persentase kemiskinan daerah secara menyeluruh melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu cara dalam mengurangi kemiskinan, strategi ini perlu dibarengi dengan upaya lain seperti peningkatan akses layanan publik serta pemerataan pendapatan di masyarakat dan ditambah dengan peningkatan produktivitas kerja.

### Upah

Bersumber pada tabel 3. di atas, nilai *coefficient* variabel Upah ialah  $3.94E-06$  dengan nilai probabilitasnya ialah  $0.0000$  yang menunjukkan  $< 0.05$ , yang memiliki arti variabel upah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hasil riset ini sama seperti dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kusumo, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari upah yang tidak bisa menekankan tingkat kemiskinan sehingga tidak sejalan dengan teori yang ada dengan menyatakan bahwa dengan ditingkatkannya upah yang diterima bisa menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah yang dihadapi sehingga upah masih belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan ialah gaya hidup masyarakat yang membawa mereka masih tetap pada di garis kemiskinan, pengeluaran masyarakat yang tidak sepadan dengan

pendapatan, cicilan, dan masyarakat yang bekerja secara informal seperti halnya pertanian dan memiliki usaha sendiri yang tidak tetap.

### **Jumlah Penduduk**

Bersumber pada tabel 3. di atas, nilai *coefficient* variabel jumlah penduduk ialah 1.97E-06 dengan nilai probabilitasnya ialah 0.0000 yang menunjukkan  $< 0.05$ , sehingga dijelaskan apabila variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hasil riset ini sama seperti dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Wahyu Azizah & Kusuma, 2018).

Pertambahan penduduk yang begitu cepat malah menambahkan masalah baru bagi usaha dalam mengentaskan kemiskinan apabila tidak diikuti dengan dukungan ekonomi yang tinggi misalnya kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, kualitas sumber daya manusia, masih banyaknya pengangguran yang berceceran karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Jumlah penduduk yang banyak juga diikuti dengan banyaknya jumlah angka produktivitas siap bekerja tetapi tidak ikuti dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia yang mengakibatkan banyaknya juga orang yang menganggur.

### **SIMPULAN**

Dapat disimpulkan dari analisis yang sudah dilakukan pada bagian pembahasan, maka ditemukannya hasil dari berbagai variabel pada penelitian ini, yaitu, zakat yang tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa disaat IPM meningkat maka tingkat kemiskinan yang ada pada Provinsi Jawa Tengah menurun. Hal ini merupakan bagian dari indikasi bahwa tingginya kualitas ketiga aspek IPM dapat dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah sehingga dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa pada saat upah meningkat tidak berpengaruh pada berkurangnya kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Masalah ini bisa saja terjadi karena kenaikan upah yang diterima dapat menjadikan masalah pada pengurangan jumlah tenaga kerja yang dipakai untuk menurunkan produksi, karena dengan upah yang tinggi maka otomatis harus ada tenaga kerja yang diberhentikan untuk menyeimbangkan pendapatan perusahaan agar tidak merugi. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa pada saat jumlah penduduk meningkat mengakibatkan kemiskinan yang meningkat pula. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan lapangan pekerjaan yang ditawarkan tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang siap bekerja yang akhirnya timbulnya orang yang menganggur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Zakat, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2013- 2018. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jawa Tengah Dalam Angka 2022*. Klaten: Badan Pusat Statistik Kota Klaten Jawa Tengah
- Chaniago, S. A. (2015). Hukum Dan Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, 13(1), 57–56.
- Damanik, R. K., Sidauruk, S. A., & Medan, U. N. (N.D.). *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara*. 28, 358–368.

- Fajar, M. A., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 108–118.
- Gabriel, C. T., Walewangko, E. N., & Mandei, D. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Dan Industri Pengolahan Sektor Perikanan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kota Bitung Tahun 2002 – 2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 127–137.
- Hasanudin, A. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan ( Study Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Duku, Sidomukti, Salatiga )*.
- Irawati, L., & Ratno, F. A. (2020). The Effect Of Trust And Income On Motivation To Pay Zakat. *Indonesian Journal Of Islamic Economics Research*, 2(2), 117–125.
- Kusumo, B. H. (2020). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten (Umk) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2019*.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Tenaga Kerja Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Equilibrium*, 6(2), 217–240.
- Pratama, R., Kindangen, P. P., & Walewangko, E. N. (2019). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Propinsi Sulawesi Utara*. 1–17.
- Ratno, F. A. (2021). *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Nilai*.
- Syuhada, M. I. (2019). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa*.
- Tawakkal, M. I., & Sapha, D. (2018). Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim)*, 3(4), 704–711.
- Wahyu Azizah, E., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180.